

DAFTAR ISI

Halaman Judul.....	i
Halaman Persetujuan.....	ii
Halaman Pengesahan	iii
Halaman Pernyataan.....	iv
Kata Pengantar	v
Daftar Isi.....	viii
Daftar Tabel	xii
Daftar Gambar dan Grafik	xiii
Intisari	xiv
Abstract	xv
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	3
C. Tujuan Penelitian.....	4
D. Manfaat Penelitian.....	4
E. Keaslian Penelitian	4
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	

A. Teori <i>Good Governance</i>	7
1. Istilah <i>Good Governance</i>	7
2. Hubungan <i>Good Governance</i> dengan Keterbukaan Informasi Publik.....	13
B. Konsep Kebebasan Informasi Publik	15
1. Jaminan Hak Akses Informasi Publik	15
2. Informasi yang Wajib Disediakan dan Diumumkan.....	18
a. Oleh Badan Publik	18
b. Oleh BUMN, BUMD, dan/atau badan usaha lainnya yang dimiliki oleh Negara	19
c. Oleh Partai Politik.....	20
d. Oleh Organisasi Non-Pemerintah.....	21
3. Informasi yang dikecualikan	21
C. Konsep Sengketa Informasi Publik	26
D. Kedudukan Komisi Informasi dalam Sistem Peradilan di Indonesia.....	30
E. Upaya Administratif	37
1. Istilah Upaya Administratif.....	37
2. Upaya Administratif dalam Penyelesaian Sengketa Informasi Publik	38
a. Pengajuan Keberatan kepada Atasan PPID	38

b. Penyelesaian Sengketa Informasi di Komisi Informasi.....	40
F. Pelaksanaan Putusan Komisi Informasi yang Berkekuatan Hukum Tetap.....	46
1. Fiat Eksekusi di Pengadilan Tata Usaha Negara.....	49
2. Fiat Eksekusi di Pengadilan Negeri.....	50

BAB III METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian.....	52
B. Lokasi Penelitian	52
C. Teknik Pengumpulan Data	52
D. Alat Pengumpul Data	54
E. Analisis Data.....	54
F. Kendala dan Cara Mengatasinya	54

BAB IV PEMBAHASAN

A. Implementasi Pelaksanaan Kewenangan Komisi Informasi Daerah Istimewa Yogyakarta dalam Menyelesaikan Sengketa Informasi Publik.....	56
1. Lembaga Komisi Informasi DIY.....	57
a. Urgensi Komisi Informasi DIY	57
b. Kompetensi Absolut dan Kompetensi Relatif.....	65
c. Hubungan Komisi Informasi DIY dengan Komisi Informasi Pusat.....	68

d. Problematika dalam Penyelesaian Sengketa Informasi Publik	68
e. Asas-asas dalam Menyelesaikan Sengketa Informasi Publik	71
f. Itikad Baik	74
2. Analisis Kasus	78
a. Perkara Nomor 004/V/KIPDIY-PS/2015	78
b. Perkara Nomor 003/I/KIDIY-PS/2016	93
B. Pelaksanaan Eksekusi Putusan Komisi Informasi DIY	103
1. Pengadilan Tata Usaha Negara Yogyakarta (PTUN)	107
2. Pengadilan Negeri Yogyakarta (PN)	116
BAB V PENUTUP	
A. Kesimpulan	125
B. Saran	129
DAFTAR PUSTAKA	130